

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA  
INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN PESISIR BARAT**  
(Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**Rowindo Pratama**

**NPM : 1621020517**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA  
INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN PESISIR BARAT**  
(Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**Rowindo Pratama**

**NPM : 1621020211**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Etika Rini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Pengembangan kepariwisataan di kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa objek daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal pasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pandangan hukum Islam khususnya fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, dalam penerapannya cukup signifikan, masih banyak program-program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang belum sepenuhnya dilaksanakan dibidang destinasi pariwisata terutama di fasilitas saran dan prasarana masih perlu dibenahi serta peran pemuda dalam mengembangkan pariwisata perlu adanya keahlian dan dukungan dari pemerintah daerah agar mereka paham mengembangkan daerahnya sendiri. Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat telah sesuai dengan *fiqh siyasah* karena prinsip dasar hukum Islam melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah sepenuhnya diterapkan secara umum yang dapat kita lihat dalam penerapan kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam memberlakukan syari'ah sebagai undang-undang (prinsip *at-tadrij fi at-tasyri'*) karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat yang berlaku secara turun-temurun tanpa meninggalkan adat budaya Lampung yang menjunjung tinggi Syari'at Islam. Prinsip keadilan yang dijelaskan didalam surat An-Nisa (4) ayat 58. Pariwisata berkelanjutan Pesisir Barat diharapkan dapat menjadikan budaya dan adat istiadat Lampung (Pesisir Barat) tetap terjaga dengan baik.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suralimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang  
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata  
Kabupaten Pesisir Barat (Studi Pada Dinas  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten  
Pesisir Barat)**

**Nama : Rowindo Pratama  
NPM : 1621020517  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Etika Rini, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Frenki, M. Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





## PENGESAHAN

## TIM MUNAQOSYAH

## Dekan

Chairuddin, M.H

210221993031002

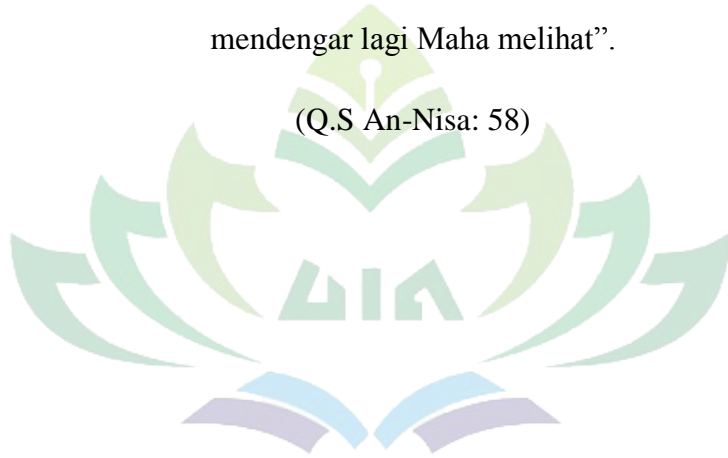


## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa: 58)



## **PERSEMBAHAN**

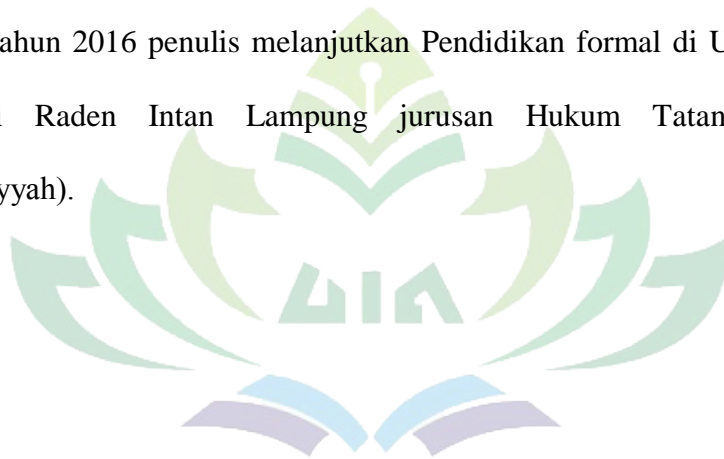
Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Wardiyanto dan Melli Erni, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Saudaraku tersayang Efanda Agusnin, yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek tercinta, Nurpelam yang selalu menyayangi penulis dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

**Rowindo Pratama**, lahir pada tanggal 08 Mei 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Wardiyanto dan Ibu Meli Erni. Untuk pertama kalinya menempuh pendidikan di:

1. Taman kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan pada tanggal 23 Juni 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Jawa pada tanggal 14 Juni 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah pada tanggal 1 Juni 2013.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah 7 Mei 2016.
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat)”**.

Sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada sahabat dan keluarganya yang telah memberikan pengetahuan yang sebenar-benarnya dalam agama islam dan semoga kelak kita diberikan syafaatnya dihari pembalasan. Dalam penelitian ini peneliti mendapat bantuan dari banyak pihak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara
4. Bapak Hervin Yoki Pradika, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara

5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang tiada lelah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar segera terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang tiada lelah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar segera terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Jurusan Siyasah atau Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Staf dan Karyawam Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Jurusan Siyasah Syar'iyah atau Hukum Tata Negara, karena telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
9. Ibu Hj. Emnayati, S.pd, M.M. Selaku Kabid Pemasaran Wisata pada Dinas Pariwisata Pesisir Barat yang telah memberikan support dan arahnya mengenai laporan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat, serta Drs. Gunawan, M.Si. selaku kepala Dinas Pariwisata yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Wardiyanto, S.E. dan Ibu Melli Erni yang selalu menyayangi, mendukung dan mendoakan penulis dalam menuntut ilmu.
11. Teman-teman kelas F Jurusan Siyasah Syar'iyah atau Hukum Tata Negara yang telah menemani berproses hingga di titik ini.

12. Sahabat-Sahabatku Fransisco, Styo Wahyudi, Ilham yang telah banyak membantu dan memberi dukungan hingga tercapainya banyak hal.
13. Sahabat-sahabatku Oktavia Denada, S.pd. dan Rafshan Syahputra yang telah mensupport dan memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Sahabat-sahabat SMP Agy Oktariando, Berian Yudha Koeswara, Aan Sumarna terdekat yang telah memberikan dukungan dari awal hingga akhir
16. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2020

**ROWINDO PRATAMA**  
**NPM :1621020517**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	18
1. Pariwisata Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	18
2. Tinjauan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	

Daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	20
a. Pengertian Pariwisata.....	21
b. Pengertian Destinasi Pariwisata.....	22
c. Dasar Hukum Tentang Pariwisata.....	23
d. Konsep Kebijakan Pariwisata.....	27
e. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata.....	29
f. Proses Perencanaan Pariwisata.....	30
g. Mekanisme Kontrol dalam Kebijakan Pariwisata.....	32
3. Pengembangan Pariwisata Menurut Hukum Islam.....	34
B. Tinjauan Pustaka.....	43

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat.....	47
1. Sejarah.....	47
2. Letak Geografis.....	49
3. Visi, Misi dan Sasaran.....	53
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	58
B. Pariwisata Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	65

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
--------------------	----

B. Rekomendasi.....	80
---------------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Riset Dinas Pariwisata Pesisir Barat
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)
- Lampiran 6 Daftar Nama Pegawai Hasil Perhitungan Sampel Dinas  
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
- Lampiran 7 Daftar Nama Pengelola dan Penyedia Jasa Usaha  
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
- Lampiran 8 Daftar Nama Masyarakat Lokal Daerah Kabupaten Pesisir  
Barat Hasil Perhitungan Sampel
- Lampiran 9 Hasil Turnitin Skripsi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Nama dan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pariwisata.....	48
Tabel 2 Data Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	50
Tabel 3 Data Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat.....	51
Tabel 4 Data Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat.....	52
Tabel 5 Kegiatan Program Pengembangan Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Pariwisata Pesisir Barat Tahun 2018.....	55
Tabel 6 Data Pegawai Negeri per Golongan pada Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	56



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 tahun 2017 Tentang Recana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat)”.

1. Menurut Hanafi Harsono, arti implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>1</sup>
2. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: peraturan daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang untuk selanjutnya dipertegas disingkat menjadi PERDA dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Hanafi Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Bandung: Pustaka Buana, 2002), h. 15.

3. Rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat merupakan pengembangan pariwisata dalam rangka menumbuhkan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat khususnya di bidang pariwisata yang berdaya guna dan berhasil guna dibutuhkan acuan sehingga pembangunannya dapat berjalan terarah dan terukur, hal ini dikarenakan tersedianya potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai modal pengembangan pariwisata seperti flora dan fauna, pantai dan laut, pulau, peninggalan purbakala ,peninggalan sejarah, seni dan budaya yang menjadi pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Yang untuk selanjutnya Rencana induk pengembangan pariwisata akan dipertegas disingkat menjadi RIPPDA dalam penelitian tersebut.
4. Menurut Hunziger dan Krapf dari Swiss dalam *Grundriss Der Allgemeinen Fernverkehrslehre*, menyatakan pariwisata adalah keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat dengan syarat orang tersebut tidak melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>2</sup>
5. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> I Gede Pinata, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), h. 34.

<sup>3</sup> Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 14.



6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin tersebut yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.<sup>4</sup>
7. Wisatawan, seseorang yang melakukan perjalanan baik secara individu maupun kelompok sejauh minimal 80 km dalam waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan untuk mencari kesenangan/rekreasi di objek/destinasi wisata.<sup>5</sup>

Berdasarkan judul secara umum, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah upaya dalam mengungkap secara lebih dalam dan kritis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat)”. Dengan demikian penulis meneliti mengenai kebijakan dan strategi rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Kebijakan dan perencanaan berkaitan erat, perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan.

---

<sup>4</sup> ISDARMANTO, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta Jl. Wonosari Km 7 Sampangan Rt 01/00 Banguntapan, Maret 2016), h.8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.6.

Dengan demikian, pengambilan keputusan pengembangan pariwisata harus melihat aspek-aspek proses perencanaan pariwisata dan dampak pariwisata terhadap lingkungan.

- b. Karena terdapat peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata, melihat dari segi keilmuan penelitian ini sangatlah berguna menyangkut kebijakan Pemerintahan Daerah mengenai pengembangan pariwisata dengan menganalisis dari segi aspek Hukum Islam.
- c. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena terdapat mekanisme kontrol dalam kebijakan pariwisata menyangkut konsep pariwisata kedepan dan belum pernah ada yang mengkaji penelitian ini karena menyangkut strategi kebijakan dengan menganalisis Hukum Islam.

## **2. Alasan Subjektif**

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Pembahasan skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .Serta berdasarkan data fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata dikatakan sebagai industri karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berorientasi pada produktivitas dan komersial.

Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya suatu daya tarik disuatu area/daerah tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau dikembangkan, jika disuatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisatawan seluruh mancanegara Menurut prof. Ir. Kusudianto Hadinoto “Provinsi lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki potensi objek wisata yang sangat menarik, selain itu penduduk Provinsi Lampung terdiri atas berbagai suku bangsa dan keanekaragaman corak kebudayaan adat istiadat dan agama”. Potensi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung dapat dijadikan modal untuk pembangunan industri pariwisata. Selain memiliki potensi pariwisata bahari, Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, pariwisata perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat “Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi: penetapan kawasan peruntukan pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia,

pengembangan kelembagaan, pengembangan fasilitas penunjang, pengelolaan lingkungan, pengembangan pasar pariwisata.”<sup>6</sup>

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.<sup>7</sup>

Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenity*) atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi.<sup>8</sup>

Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran dan *rest area*.

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

<sup>7</sup> Gde Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009), h.134.

<sup>8</sup> W. Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 76.



Rencana pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat berupa pengelolaan pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, pengelolaan lingkungan serta pengembangan pasar wisata masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif karena masih banyak masyarakat di daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat di daerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan disepanjang pesisir pantai kabupaten pesisir barat sedangkan pengelolaan pariwisata di Pesisir Barat sudah dicanangkan oleh pemerintahan daerah berupa peraturan kebijakan tentang pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi *budget* perjalanan mereka tersebut. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Akses berkaitan dengan infrastruktur transportasi, seperti lapangan udara, terminal bus dan kereta api, jalan tol, dan sejenisnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> G. Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 28.

Dari segi aspek Fasilitas dan penunjang aksesibilitas pariwisata di Pesisir Barat sangatlah baik secara fungsional sebab pengembangan akses berwisata dipesisir barat sangatnya mendukung karena banyaknya penyewaan dan fasilitas kendaraan jalur darat maupun jalur udara yang sangat mudah diakses melalui internet, akan tetapi dalam infrastruktur fasilitas penunjang berwisata dipesisir barat masih kurang memadai sebab fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan daerah pesisir masih kurang efektif seperti tidak tersedianya kegiatan pasar wisata, kemudian fasilitas olahraga air, taman ramah anak, lalu dari segi infrastruktur untuk perawatan fasilitas wisata dipesisir barat tidak dikelola secara baik masih banyak fasilitas wisata seperti penerangan lampu, taman wisata, dan fasilitas-fasilitas infrastruktur pantai yang lainnya dan belum dibenahi pengelolaannya, walaupun beberapa fasilitas penunjang wisata sudah ada yang diperbaiki dalam pengelolaannya hanya beberapa saja.

Kemudian dalam pengembangan wisata di daerah tersebut belum diketahui secara pasti mengenai arah konsep/model pengembangan pariwisata di daerah tersebut, seperti pengembangan konsep/model pariwisata berbasis syariah atukah menggunakan konsep/model wisata kearifan lokal dengan berbasis lingkungan ,serta melihat dari sudut pandang hukum Islam bagaimana penerapan konsep tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dilihat dari berbagai sudut pandang mengenai pengembangan konsep/model pariwisata tersebut sesuai atau tidaknya dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata tersebut. Karena masih banyak

masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat masih kental terhadap adat istiadat setempat yang masih terlestarikan dan terjaga kearifan lokalnya.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai model pengembangan pariwisata di daerah tersebut, karena dilihat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 hanya menjelaskan rencana pengembangan pariwisata dan penetapan kawasan peruntukan pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan seharusnya di dalam pasal yang berkaitan tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai konsep/model pengembangan pariwisata daerah tersebut kemudian baru diuraikan secara terperinci mengenai kawasan peruntukan pariwisata beserta rencana pengembangan pariwisata daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan pariwisata Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat, ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah pada dinas atau instansi, pada konsep pengembangan wisata di Pesisir Barat serta pengelolaan pariwisata berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan analisis Hukum Islam. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat (studi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat).

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi ataupun dibidang ilmu pengetahuan khususnya, mengenai dalam hal rencana induk pengembangan pariwisata daerah mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada “ Analisi Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata” yang objek utamanya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat.

## **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis, bermanfaat bagi praktisi ataupun dibidang ilmu pengetahuan khususnya, dalam hal rencana induk pengembangan pariwisata daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif penetapan kawasan zona pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan usaha pariwisata daerah melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian lapangan dapat menjadi pedoman mengenai rencana induk pengembangan pariwisata daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penetapan kawasan zona pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat khususnya beserta strategi kebijakan pengembangan pariwisata, dan bagi masyarakat pada umumnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reserach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau



sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>10</sup> Dalam hal ini secara langsung mengamati mengenai rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang RIPPDA pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

## **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian pada persoalan penentuan hukum dari RIPPDA yang terkait tentang masalah mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.26.

(arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah yakni bagian pemasaran dan pengelolaan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat dan sebagian dari pegawai Dinas Pariwisata sebagai sumber informasi, yang memahami serta melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi keperpustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan daerah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **4. Populasi dan Sample**

#### **a. Populasi**

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.<sup>11</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, pihak

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme penelitian hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.279-280

pengelolaan kawasan pariwisata, dan sebagian dari masyarakat yang berada dipesisir barat yang berjumlah 34 orang, yang terdiri dari: golongan IV berjumlah 3 orang, golongan III berjumlah 8 orang, golongan II berjumlah 3 orang, pihak pengelola pariwisata berjumlah 10 orang, masyarakat sekitar 10 orang.

#### **b. Sampel**

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Berapa Banyak jumlah sample yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku mengenai hal itu.<sup>12</sup> Sesuai dengan penjelasan, karena populasinya berjumlah 34 orang maka yang dijadikan sample pada penelitian ini berjumlah 20 orang sebagian dari Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, sebagian dari pihak pengelola kawasan pariwisata, dan sebagian dari masyarakat yang berada di Pesisir Barat.

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik penelitian *non random sampling*, teknik sample dimana peneliti telah menentukan/menunjukan sendiri sample dalam penelitiannya<sup>13</sup> Teknik sample ini bertitik pada semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Karena pemilihan sample yang dipilih dalam populasi mengarahkan pada data-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.172

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.173

data yang akan dicantumkan dan mempermudah dalam mencari informasi. Prosedur yang digunakan *non random sampling* ini adalah dipilih melalui karakteristik khusus sebagian diambil sample dari pegawai Dinas Pariwisata yang terdiri dari bidang yang akan dipilih untuk dijadikan objek sample, yaitu Khotman Kabid Bidang Destinasi Pariwisata, Emnayati Kabid Bidang Pemasaran, Yulius Busyairi Kabid Bidang Usaha Jasa Pariwisata, Hudri Kabid Pengembangan SDM Pariwisata, Aries Pratama Kasi Promosi & Budaya, Yunia Rahmawati Kasi Objek & Daya Tarik Wisata, Eko Yosep Nainggolan Kasi Akomodasi, Puspita Maharisa Staf SDM Pariwisata beserta sebagian pihak pengelola kawasan pariwisata disesuaikan dan mempermudah dalam mencari informasi dan dokumentasi data dengan sample yang diperlukan dalam penelitian.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

### **a. Interview (Wawancara)**

*Interview* adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>14</sup> Praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai dinas pariwisata (yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan perencanaan pariwisata

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.161-162

daerah), serta pihak pengelolaan kawasan pariwisata, dan sebagian dari masyarakat yang berada dikawasan wisata Pesisir Barat. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berupa kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai kawasan peruntukan pariwisata daerah yang selanjutnya dilihat dari segi aspek Hukum Islam.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.217



## 6. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
- b. *Sistemizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ialah Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat akan dikaji menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari segi aspek hukum Islam. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata ditinjau dari aspek hukum Islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Pariwisata Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat**

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijakan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.<sup>17</sup>

Tujuan dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) adalah:

- a. Secara umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pelayanannya.
- b. Secara khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

<sup>17</sup> Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2006), h. 20.

bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas terkait dengan wisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan terkait dengan wisata . Dalam firman-Nya Q.S. al-‘Ankabut (29) ayat 20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. al-‘Ankabut (29) : 20).<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami, menurut tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Katakanlah wahai nabi kepada para pendusta risalahmu itu: “Berjalanlah kalian di permukaan bumi lalu lihatlah bagaimana awal mula penciptaan makhluk sebelum kalian dengan bentuk yang berbeda-beda dan perangai yang berubah-ubah, supaya kalian mengerti kesempurnaan kuasa Allah”. Jejak peninggalan mereka menunjukkan keberadaan mereka. Kemudian Allah menghidupkan lagi makhlukNya usai kebangkitan pertama yang disebut awal penciptaan. Sesungguhnya awal penciptaan dan proses penghidupan ulang itu adalah dua kebangkitan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu dan tidak ada sesuatu yang tidak mampu

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Terjemahan dan tajwid*, cet. 11, (Bandung: dii Cordoba, 2016), h.20

dilakukanNya seperti awal penciptaan awal dan penghidupan kembali. Kata Bada'a dan Abda'a itu bermakna satu yaitu awal penciptaan, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada. Dan kebangkitan akhirat adalah proses menghidupkan makhluk pada hari kiamat.

## **2. Tinjauan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat**

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan<sup>19</sup> :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

Kemudian pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya. Mengenai pengembangan pariwisata daerah berdasarkan

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 03

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban<sup>20</sup> :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Kemudian mengenai Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.<sup>21</sup>

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang mencakup wisatawan dan layanan terkait disediakan dan dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk berwisata di suatu

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 23

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 9 ayat (5)



tempat di luar lingkungan yang biasanya tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan keperluan lain.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

b. Pengertian Destinasi Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009), h.45.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.126.

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.<sup>24</sup> Teknik yang sering digunakan dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah *carrying capacity* (daya dukung kawasan).

#### c. Dasar Hukum Tentang Pariwisata

Pariwisata dapat direalisasikan baik dalam Al-Qur'an, maupun dalam hadits Nabi SAW.

Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu mensyukuri ciptaan Allah SWT, agar kita selalu mengingatnya tentang penciptaan alam semesta dengan melakukan sebuah perjalanan kita dapat mengambil hikmah yang ada didalamnya agar kita selalu mensyukuri segala ciptaannya.

Hal ini mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Saba (34) ayat 18 :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهَرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا  
السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

*Artinya: "Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.134.

*berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”.*<sup>25</sup> (Q.S. Al Saba (34): 18).

Yang dimaksud dengan negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya ialah negeri yang berada di Syam, karena kesuburannya; dan negeri- negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan.

Dalam Al Qur'an surat Muhammad (47) Ayat 10 :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang- orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”.<sup>26</sup> (Q.S. Muhammad (47) : 10).

Dalam hadits riwayat Yahya bin 'Is-haq diceritakan :

---

<sup>25</sup> Q.S. Al Saba (34) : 18

<sup>26</sup> Q.S. Muhammad (47) : 10

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

Artinya : "Saya mendengar Anas berkata, "Kami bepergian dengan Nabi (ﷺ) dari Madinah ke Mekah dan menawarkan dua rakaat (untuk setiap doa) sampai kami kembali ke Madinah." Saya berkata, "Apakah Anda tinggal sebentar di Mekah?" Dia menjawab, "Kami tinggal di Mekah selama sepuluh hari<sup>27</sup>". (Sahih al-Bukhari: 1080 Hadits 186 )

Dari Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki diceritakan :

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، وَاصْطَحَبَ، هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مَرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا."

Artinya: "Saya mendengar Abu Burda yang menemani Yazid bin Abi Kabsha dalam sebuah perjalanan. Yazid biasa mengamati puasa dalam perjalanan. Abu Burda berkata kepadanya, "Saya mendengar Abu Musa beberapa kali mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ berkata, 'Ketika seorang budak jatuh sakit atau bepergian, maka dia akan mendapatkan hadiah yang serupa dengan yang dia dapatkan untuk perbuatan baik yang dilakukan

<sup>27</sup> Sahih al-Bukhari: Vol. 2, Book 20, Hadith 186

di rumah ketika dalam keadaan sehat."<sup>28</sup> (Sahih al-Bukhari, 2996)

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits dapat dimengerti bahwa pariwisata merupakan suatu bentuk perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu mensyukuri ciptaan Allah SWT, dengan melakukan perjalanan kita dapat mengetahui berbagai macam kebudayaan dan ciri khas daerah tersebut terutama mempelajari jejak sejarah islam yang pernah melekat disetiap unsur kehidupan manusia agar kita selalu mensyukuri ciptaan tuhan yang sangat indah.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mengenai Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

---

<sup>28</sup> Sahih al-Bukhari, Vol. 4, *Book of Jihaad*, Hadith 239



#### d. Konsep Kebijakan Pariwisata

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.<sup>29</sup>

Istilah kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*) berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walaupun prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan pelaksanaan.

Sejarah pengembangan kebijakan pariwisata dunia mulai seiring perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Pada era 1980-an terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal (*mass tourism*) ke pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang mana industri telah memasuki era globalisasi, supersegmentasi, teknologi baru, dan

---

<sup>29</sup> Abdul Kahar Badjuri, *Kebijakan Publik* (Semarang: JLP UNDIP, 2002), h. 13.

meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi.<sup>30</sup>

Persaingan menjadi fungsi utama dalam industri pariwisata.

Menurut Fayos-Sola, perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami tiga tahap generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

1) Paradigma kebijakan pariwisata missal.

Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapat pariwisata yang sebesar-besarnya, dan penciptaan lapangan kerja disektor pariwisata.

2) Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan social.

Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah dimulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan pariwisata mulai diredefinisi.

3) Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik)

Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor.

---

<sup>30</sup> I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata* ,(Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET, 2009), h.106.

<sup>31</sup> *bid.*, h.107-108.

#### e. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :<sup>32</sup>

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- 2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.81

Pembangunan kebudayaan, ditunjukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian yang beradab, serta dengan mendorong guna membangun masyarakat yang memahami pentingnya pengembangan budaya daerah.<sup>33</sup> Sasaran yang ingin dicapai dalam program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yaitu : <sup>34</sup>

- 1) Meningkatkan efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam secara global.
- 2) Terwujudnya kegiatan pariwisata yang mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya masyarakat lain.
- 3) Terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana pendukung upaya berkreasi dibidang kesenian dan wahana yang mendukung pengembangan serta pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan.
- 4) Meningkatkan sumbangan pariwisata dalam mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- 5) Meningkatnya kualitas pengembangan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.

#### f. Proses Perencanaan Pariwisata

Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah pada semua level terlibat dalam mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang,

---

<sup>33</sup> Sedarmayati., *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), h. 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.18-19

dan sebagainya.<sup>35</sup> Pada masa mendatang, tantangan industri pariwisata akan semakin berat. Dengan peningkatan kecenderungan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, industri pariwisata akan semakin terbuka dan semakin banyak terhubung melalui jaringan. Kosekuensi pentingnya adalah dinamika industri pariwisata nasional tidak lagi dapat dipisahkan dari industri pariwisata global dan akan semakin terbuka terhadap lalu lintas barang dan jasa.

Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meletakkan landasan pengembangan industri pariwisata yang mengacu pada kepentingan nasional, dengan peran pemerintah optimal dalam menciptakan persaingan sehat<sup>36</sup> Program pembangunan nasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang dapat dirumuskan dalam Rencana Strategis Kebudayaan dan Pariwisata Nasional diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal melalui<sup>37</sup> :

- 1) Program pengembangan nilai budaya
- 2) Program peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat dalam pengelolaan keragaman budaya.
- 3) Program peningkatan industri dan karya budaya bangsa
- 4) Program peningkatan kerja sama kebudayaan di dalam negeri
- 5) Program pelestarian aset budaya.
- 6) Program pengembangan destinasi dan ragam daya tarik pariwisata.

---

<sup>35</sup> I Gde Pitana. dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET, 2009), h.108

<sup>36</sup> Sedarmayati., *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan Industri Pariwisata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.22-23.

<sup>37</sup> *ibid.*, h.22

7) Program pengembangan pemasaran pariwisata

8) Program pengembangan kualitas produk pariwisata

Keadaan tersebut mensyaratkan adanya aktivitas industri pariwisata yang secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam pengembangan pariwisata.

g. Mekanisme Kontrol dalam Kebijakan Pariwisata

Regulasi merupakan usaha dari instansi (pemerintah) yang telah diberikan wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu. Salah satu bentuk regulasi pemerintah yang bisa dijadikan contoh adalah audit lingkungan, audit lingkungan pada dasarnya merupakan alat manajemen yang didesain untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah organisasi dikelola untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan.<sup>38</sup>

Pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal, dengan demikian masyarakat lokal memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan dan masyarakat harus berpartisipasi dalam implemementasi pembangunan kepariwisataan.<sup>39</sup>

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan berprinsip pada:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> I Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET, 2009), h.118.

<sup>39</sup> Sedarmayanti, Gumelar S. Sastrayuda., *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata* (Bandung:PT Refika Aditama, 2018), h.141.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.141-142



- 1) Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai salah satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal.
- 2) Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan pada lingkungan alam, budaya, dan manusia.
- 3) Pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus melakukan tindakan untuk memadukan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- 4) Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung dan tidak langsung untuk proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan.
- 5) Pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan membutuhkan dukungan dan promosi sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan.
- 6) Promosi berbagai bentuk lainnya dari pariwisata yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan jaminan terhadap stabilitas dalam jangka panjang.

Sejalan dengan komitmen dan tekad yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu pilar utama pembangunan perekonomian, maka upaya pemanfaatan dan

pengembangan sumber daya hayati dan budaya harus diimbangi dengan upaya pelestarian dan kelangsungan dalam jangka panjang.

### 3. Pengembangan Pariwisata Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri “syariah”. Terdapat tiga unsur-unsur yang menjadi penarik dan obyek pariwisata yaitu segi keindahan alam (strategis), segi sejarah (historis), dan segi budaya (kultural) di suatu tempat. Resistensi Islam atas pariwisata akan jadi bermakna dan menjadi sngat penting jika direlasikan dengan jenis wisata yang dikembangkan, apabila kaum muslim yang menjadi tuan rumah, dan akan menjadi penting juga ketika umat muslim yang menjadi wisatawan atau *turism*. Dalam hal pemilihan tempat wisata dan budaya pada suatu tempat resistensi juga akan menjadi ranah yang pribadi.

Dari segi strategis wisata religi dikembangkan pula sebagai semua upaya pemasaran dan pengembangan produk yang diarahkan pada umat Islam, meskipun tidak terkait motivasi agama, atau upaya yang menekankan pentingnya turis Muslim dan non-Muslim sebagai pasar baru dan tujuan untuk pariwisata. Dengan kata lain, *Islamic tourisme* untuk mempromosikan pariwisata di kalangan umat Islam, mengembangkan tujuan wisata baru, dan memperkuat kerjasama antar organisasi dan antar-pemerintah di Dunia Islam. Dalam membangun pariwisata yang halal atau pariwisata islami maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dan

dijalankan supaya wisata islami dapat di bangun dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam sehingga wisatawan mendapat kenyamanan saat berwisata serta tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang ada didalamnya.

Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, maka pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumber daya ditunjukan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan. Hal ini berarti manajemen sumber daya berperan dalam pemilihan aktivitas yang berdampak minimal terhadap kelestarian ekosistem. Strategi manajemen sumber daya, harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut<sup>41</sup>:

- a. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (*renewable resources*), misalnya energi matahari, pemanfaatan ikan dan sumber daya laut yang tidak langka dan dilarang.
  - b. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan (*multiple uses*), pemakaian sumber daya untuk berbagai kepentingan, yang bisa berjalan bersama. Misalnya, sumber daya pantai dan kawasan pesisir dapat dijadikan kawasan budidaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan sebagainya.
  - c. Daerah zona, pembatasan kawasan tertentu dan kawasan pembatas dalam rangka meminimalisasi dampak terhadap lingkungan secara keseluruhan.
- Pembagian kawasan harus jelas dengan peruntukan masing-masing.

---

<sup>41</sup> I Gde Pitana. dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata* ,(Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET, 2009), h. 90.

d. Konservasi dan preservasi sumber daya, perlindungan dan pelestarian semua sumber daya mendekati kondisi aslinya dengan memelihara proses alaminya.

Terdapat tiga unsur-unsur yang menjadi penarik dan obyek pariwisata yaitu segi keindahan alam (strategis), segi sejarah (historis), dan segi budaya (kultural). Dari segi kultural mengenal unsur budaya yang menjadi penarik kepariwisataan adalah dari segi bahasa, bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai oleh orang-orang tempat turunnya Al Qur'an, bahasa Arab adalah bahasa sehari-hari Nabi Muhammad SAW, sampai saat ini masih dimengerti banyak orang baik membacanya, menulisnya maupun mempercakapkannya dengan mahir. Berikut ini potongan-potongan ayat Al Qur'an tentang bahasa Arab:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).”<sup>42</sup> (Q.S. Az Zukhruf (43) ayat 3)

Di samping menjadi daya tarik kepariwisataan dari unsur kesenian segi kultural. Banyak umat Islam yang menuangkan cipta, rasa dan karsanya untuk menuliskan Ayat-ayat Al Qur'an seperti tulisan kaligrafi, batu-batu pualam, marmer, emas bertatakan mutiara seperti pada masjid-masjid di Spanyol, di Brunei Darussalam dan di India (misalnya masjid Taj Mahal yang dibangun Kaisar Shah Jehan).<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Q.S. Az Zukhruf (43) : 3

<sup>43</sup> Inu Kencana Syafie., *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.100-102.

Dari segi historis hakikat sejarah terkandung pengertian penelitian dan usaha mencari kebenaran, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal usul sesuatu peristiwa atau benda.<sup>44</sup> Peninggalan sejarah dituntut kemurniannya. Di samping peninggalan-peninggalan sejarah islam seperti peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al Qur'an tentang Fir'aun masih dapat kita temui hingga sekarang, misalnya piramid, mummi dan sphinx.

Dalam pandangan Islam, pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri "syari'ah", kenyataan ini telah membuat Negara Saudi Arabia memetik banyak keuntungan baik secara material maupun statusnya sebagai sebuah negara yang memiliki tempat yang dianggap suci oleh kaum muslim yakni Mekah dan Madinah.<sup>45</sup>

Pariwisata ternyata juga berperan di dalam mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (*religousness*) manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disinggung di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang melakukan prosesi dan safari suci Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah.

Bahkan sekarang berkembang wisata ibadah umrah plus mengunjungi berbagai tempat bersejarah di negara-negara Timur Tengah. Tentu saja

---

<sup>44</sup> Inu Kencana Syafie., *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.106.

<sup>45</sup> "pariwisata-dalam-agama-islam" (On-line), tersedia di : <http://dewieupw1a.blogspot.com> (12 Maret 2014), [pariwisata-dalam-agama-islam.html](http://pariwisata-dalam-agama-islam.html), Diakses 26/02/2020., 10.54

wisata agama ini bukan hanya milik Islam, bahkan hampir semua agama memiliki wisata jenis ini dengan segala variasinya menurut kepercayaan dan sosial budaya mereka.

Dalam ajaran Islam terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap terjaga, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'la, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman<sup>46</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Ankabut(29) : 20)

Dari segi strategis wisata religi dikembangkan pula sebagai semua upaya pemasaran dan pengembangan produk yang diarahkan pada umat Islam, meskipun tidak terkait motivasi agama, atau upaya yang menekankan pentingnya turis Muslim dan non-Muslim sebagai pasar baru dan tujuan untuk pariwisata. Dengan kata lain, *Islamic tourisme* untuk mempromosikan pariwisata di kalangan umat Islam, mengembangkan tujuan wisata baru, dan

---

<sup>46</sup> QS. Al-Ankabut(29) : 20



memperkuat kerjasama antar organisasi dan antar-pemerintah di Dunia Islam.<sup>47</sup>

Dalam membangun pariwisata yang halal atau pariwisata islami maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dan dijalankan supaya wisata islami dapat di bangun dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam sehingga wisatawan mendapat kenyamanan saat berwisata.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab I, Pasal 3, dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>48</sup>

Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara.<sup>49</sup> Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengendali.

Kajian Fiqh siyasah dalam kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan prinsip *at-tadrij fi at-tasyri'* atau berangsur-angsur dalam

---

<sup>47</sup> "Pariwisata dalam pandangan islam Bab II (On-line)", tersedia di : <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10313/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y..>, (27 Februari 2020), 14.54, diakses pada 10 April 2020, 10.30

<sup>48</sup> Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 3

<sup>49</sup> Beni Ahnad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.25

memberlakukan syari'ah sebagai undang-undang<sup>50</sup> Hal ini dilakukan karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat yang berlaku secara turun-temurun.

Dari penjelasan yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri'*, dapat dikatakan pula bahwa *tasyri'* menjelaskan hukum, dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan Fiqh siyasah terdapat prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyasah*, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>51</sup> :

a. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT

Al Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59 :

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.38

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa(4) : 59)

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa(4) : 58)

#### c. Prinsip Persamaan (Musyawarah)

Prinsip bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal. Praktik musyawarah Rasulullah salah satu hal yang patut dikaji dari periode tersebut adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.<sup>52</sup>

Hal ini karena dari mekanisme pengambilan keputusan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Sesuai dengan petunjuk Al Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabat.<sup>53</sup> Beliau sendiri, meskipun seorang Rasul, sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula, beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau lemparkan masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.

Selain itu, Nabi tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat. Hal ini tidak selalu karena beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui wahyu.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.195

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.195-196

Dalam beberapa peristiwa, Nabi mengambil keputusan yang bertentangan dengan pendapat para sahabat, dan kemudian turun wahyu yang membenarkan pendapat yang tidak diterima oleh Nabi<sup>54</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan pengembangan pariwisata :

1. Skripsi yang berjudul “Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat” yang ditulis oleh Wardana, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2017. Kawasan wisata Kabupaten Pesisir Barat selain tercantum sebagai salah satu wisata unggulan Provinsi Lampung dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 2012-2031, dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Kepariwisata, beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan salah satu kawasan strategis dari beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Lampung yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan mengunggulkan wisata bahari sebagai daya tarik wisatanya, dimana sebagian besar kawasan wisata Pesisir Barat yaitu wisata bahari. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, tetapi disayangkan saat ini pariwisata di wilayah Pesisir Barat masih berkembang secara alami dan minim

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.196

perhatian pemerintah, seperti di beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat, contohnya obyek wisata bahari di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong yang memiliki potensi pariwisata namun belum ada tersedia sarana maupun prasarana oleh pemerintah setempat, akan tetapi ada juga beberapa kawasan pariwisata yang sudah mulai dikembangkan dan diberi fasilitas baik sarana dan prasarana yang sudah terbilang baik, kawasan pariwisata itu diantaranya kawasan wisata Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pantai Karang Nyimbor di Kecamatan Pesisir Selatan. Kawasan pariwisata berikut wisatawan bisa merasakan fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan, sarana hiburan, kuliner (makanan), keberihan dan kemudahan akses menuju ke kawasan pariwisata.

2. Skripsi yang berjudul “ Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*)”, yang ditulis oleh N. Erna Marlia Susfenti, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan pembangunan desa yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal sebagai pemegang kepentingan. Secara formal pengembangan wisata berbasis masyarakat ini merupakan kebijakan resmi pemerintah. Desa sukajadi merupakan desa yang sudah memiliki struktur pemerintah yang cukup bagus dan sangat mendukung desa ini menjadi desa wisata. Hal ini bisa terbukti dengan adanya penataan ruang desa seperti perbaikan-perbaikan akses menuju daerah wisata. Hampir seluruh jalan menuju lokasi wisata berada dalam



kondisi yang bagus, begitupun halnya dengan fasilitas wisata lain seperti *condominium* dan *villa*. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Sukajadi berdasarkan potensi objek wisata dan kesiapan masyarakatnya dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu merancang beberapa fasilitas wisata, misalnya seperti adanya toko – toko souvenir yang menjual oleh – oleh khas Desa Sukajadi baik berupa makanan maupun kerajinan tangan lainnya. Strategi yang kedua adalah meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan kompetensi masyarakat dalam pengembangan desa sesuai dengan prinsip CBT yang sepenuhnya melibatkan masyarakat.

3. Skripsi yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata Dam Margotirto di Desa Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”, yang ditulis oleh Ariz Nisrina, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2018 Penelitian ini akan melihat bagaimana Partisipasi Masyarakat Gisting Bawah dalam proses Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata Dam Margotirto. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang tinggal disekitar lokasi Objek Wisata Dam Margotirto. Partisipasi yang dijabarkan meliputi bentuk partisipasi masyarakat baik secara nyata berupa partisipasi tenaga, partisipasi uang, dan partisipasi harta benda dan bentuk partisipasi abstrak (tidak nyata) berupa ide atau gagasan, kritik dan saran dalam proses perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan

pengawasan (*Controlling*). Kemudian melihat bagaimana tingkat partisipasi dari masyarakat Gisting Bawah dan mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi yang sebaiknya dilakukan dalam upaya mengatasi masalah yang ada.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus membahas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat (RIPPDA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badjuri, Abdul Kahar. *Kebijakan Publik*, Semarang: JLP UNDIP, 2002.
- Fajar ND, Mukti. *Dualisme penelitian hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Harsono, Hanafi. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: Pustaka Buana, 2002.
- Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Media Aksara, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Terjemahan dan tajwid*, cet. 11, Bandung: dii Cordoba, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pinata, I Gede. *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005.
- Pinata, I Gde. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009.
- Putra, W. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Saebani, Beni Ahnad. *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sedarmayanti, Gumelar S. *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sedarmayanti, Gumelar S. *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Suwantoro, G. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

## **C. Sumber Online**

“Pariwisata dalam pandangan islam Bab II”. (On-line), tersedia di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10313/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>., (27 Februari 2020).

“pariwisata-dalam-agama-islam”. (On-line), tersedia di: <http://dewieupw1a.blogspot.com> (12 Maret 2014).

## **D. Wawancara**

Andi Supriyanto, wawancara dengan penulis, Nelayan-Pesisir Barat, tanggal 2 April 2020.

Aries Pratama, wawancara dengan penulis, bagian Kasi Promosi Pariwisata & Budaya, Krui Pesisir Barat, tanggal 24 Maret 2020.

Emnayati, wawancara dengan penulis, bagaian Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Krui Pesisir Barat, pada tanggal 24 Maret 2020.

Eko Yosep Nainggolan, wawancara dengan penulis, bagaian Kasi Akomondasi, Krui Pesisir Barat, pada tanggal 26 Maret 2020.

Hudri, wawancara dengan penulis, bagaian Kepala Bidang Pengembangan SDM, Krui Pesisir Barat, pada tanggal 26 Maret 2020.

Joni, wawancara dengan penulis, Labuhan Jukung *Cottage* Krui, tanggal 28 Maret 2020.

Khotman, wawancara dengan penulis, bagaian Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Krui Pesisir Barat, pada tanggal 25 Maret 2020.

Mustofa Yusuf, wawancara dengan penulis, Pedagang-di kawasan Pesisir Barat, tanggal 2 April 2020.

Puspita Maharisa, wawancara dengan sebagai penulis, Staf SDM Pariwisata, Krui Pesisir Barat , tanggal 26 Maret 2020.

Supriyadi, wawancara dengan penulis, Pengelola *Be Ocean*-Krui Selatan Pesisir Barat, tanggal 1 April 2020.

Yulius Busyairi, wawancara dengan penulis, bagaian Kepala Bidang Usaha Jasa Pariwisata, Krui Pesisir Barat, pada 26 Maret 2020.

